

**PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI RUSIA TERHADAP
KONFLIK SURIAH, 2015-2018**

(Skripsi)

Oleh

Hanifah Az Zahra



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRACT

THE CHANGING OF RUSSIAN FOREIGN POLICY TOWARDS THE SYRIAN CONFLICT, 2015-2018

By

Hanifah Az Zahra

This study analyzes changes in Russian foreign policy towards the Syrian conflict from 2015 to 2018. Using the concept of foreign policy that focuses on the analysis of foreign policy changes and the concept of national interest as analytical framework, this type of qualitative research uses case study design, with data collection techniques through library research from the annual report of the Russian National Security Strategy and Politburo 2.0 from Minchenko. This research shows that, in the period of 2015-2018, there had been changes in the three forms, namely changes in adjustments which occurred in small but detailed stages in every Russian foreign policy action, changes in the programs in which the changes were continuing to develop into a series of major programs in support of the Syrian government and changes in international orientation that occurred due to external shocks.

This research also indicates four agents behind the changes in Russian foreign policy. Among the four agents, there are two main dominant agents, namely leader driven (leader as the holder of control in making foreign policy) and external shocks (originating from international actions or phenomena, these shocks affected taking or becoming a trigger for changing foreign policy).

Keywords: Changes in adjustments, program changes, changes in international orientation, leader driven, external shocks.

ABSTRAK

PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI RUSIA TERHADAP KONFLIK SURIAH, 2015-2018

Oleh

Hanifah Az Zahra

Penelitian ini menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Rusia terhadap konflik Suriah dari tahun 2015 hingga 2018. Menggunakan konsep kebijakan luar negeri yang berfokus pada analisis perubahan kebijakan luar negeri dan konsep kepentingan nasional sebagai kerangka analitis, penelitian ini berjenis kualitatif menggunakan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dari laporan tahunan milik *Russian National Security Strategy* dan Politburo 2.0 dari Minchenko. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Rusia terhadap konflik Suriah pada tahun 2015 hingga 2018 mengalami perubahan pada tiga bentuk yaitu perubahan penyesuaian yang mana perubahan tersebut terjadi pada tahap-tahap kecil namun detail dalam setiap aksi kebijakan luar negeri Rusia, perubahan program yang mana perubahan tersebut terus berkembang menjadi rangkaian program utama dalam mendukung pemerintah Suriah serta perubahan orientasi internasional yang terjadi akibat adanya guncangan eksternal.

Penelitian ini juga memperlihatkan agen-agen dibalik perubahan kebijakan luar negeri tersebut. Keempat agen pengubah kebijakan luar negeri Rusia itu, terdapat dua agen utama paling dominan, yaitu *leader driven* (pemimpin sebagai pemegang kendali dalam pengambilan kebijakan luar negeri) dan *external shocks* (guncangan eksternal yang berasal dari aksi atau fenomena internasional; guncangan ini memengaruhi pengambilan atau menjadi faktor pemicu kebijakan luar negeri berubah).

Kata kunci: Perubahan penyesuaian, perubahan program, perubahan orientasi internasional, *leader driven*, *external shocks*.

**PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI RUSIA TERHADAP
KONFLIK SURIAH, 2015-2018**

Oleh

HANIFAH AZ ZAHRA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR
NEGERI RUSIA TERHADAP KONFLIK
SURIAH, 2015-2018

Nama Mahasiswa : Hanifah Az Zahra

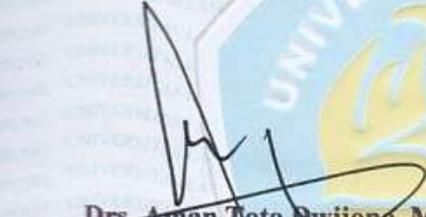
Nomor Pokok Mahasiswa : 1416071037

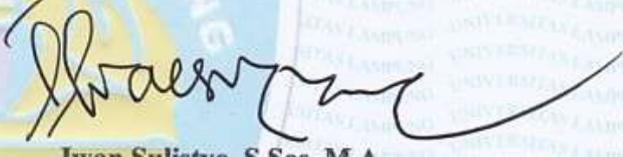
Program Studi : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

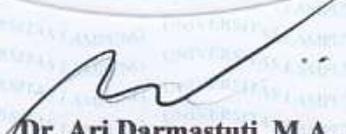
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.
NIP. 19570728 198703 1 006


Iwan Sulistyono, S.Sos, M.A.
NIP. 19860428 201504 1 004

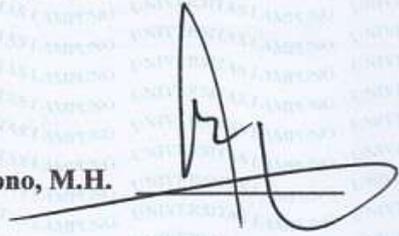
2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP. 19600416 198603 2 002

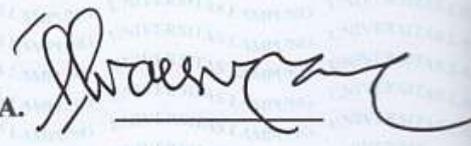
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

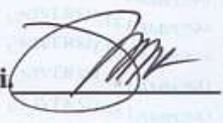
Ketua : Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.



Sekretaris : Iwan Sulisty, S.Sos, M.A.



Penguji : Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya, M.Si.
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 1 Agustus 2019



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145

telepon: (0721) 704626 email: pshi@fisip.unila.ac.id. Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id/>

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Juli 2019
Yang membuat pernyataan,



Hanifah Az Zahra
1416071037



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis Hanifah Az Zahra. Lahir di Bandarlampung pada tanggal 5 Agustus 1996 sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Fauzi Ashar dan Ibu Umi Sya'diah.

Pendidikan Formal yang penulis tempuh dimulai dari Taman Kanak-Kanak Aisyah Bandarlampung, Sekolah Dasar di SD Negeri Lamlumpang Banda Aceh tahun 2002-2004, dilanjutkan di SD Negeri Sidoklumpuk Sidoarjo, Jawa Timur tahun 2004-2008. Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 6 Sidoarjo pada tahun 2008 dan lulus di tahun 2011. Selanjutnya, pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAS Muhammadiyah 2 Sidoarjo pada tahun 2011 dan lulus di tahun 2014.

Penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi dengan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2014 melalui jalur masuk SBMPTN. Penulis aktif dalam beberapa kegiatan, seperti terlibat dalam kegiatan diantaranya pernah menjadi anggota pengurus himpunan mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional sebagai wakil sekretaris pada tahun 2015-2016, menjadi delegasi Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia

(PNMHII) XXVII di Universitas Sebelas Maret pada tahun 2015, meraih juara III pada Forum Diskusi Ilmiah *Chamber* Ekonomi PNMHII XXVII, aktif dalam kepanitiaan PSMNHII-30 Universitas Lampung, aktif dalam kepanitiaan *Sakai Sambaiyan*. Pada Agustus tahun 2017, penulis berkesempatan melakukan kegiatan magang di Dinas Perdagangan Pemerintah Provinsi Lampung, pada bidang kerja Perdagangan Luar Negeri.

MOTTO

“Do the best and God will take the rest”

“Jangan menyerah, besok dicoba lagi.”

(Penulis, 2019)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya sederhana ini untuk :

Diriku sendiri,

Terima kasih Hani untuk tidak menyerah dan telah menyelesaikan karya kecil ini.

Kedua orang tuaku

Bapak Fauzi Ashar dan Ibu Umi Sya'diah,

Terima kasih atas doa, cinta dan semangat yang selalu diberikan.

Serta Almamaterku

Universitas Lampung

Yang telah memberikan banyak pengalaman selama menempuh studi di jurusan
Hubungan Internasional.

SANWACANA

Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillahilahirabil'alamin, puji syukur atas keridhoan Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perubahan Kebijakan Luar Negeri Rusia Terhadap Konflik Suriah, 2015-2018”**. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas cahaya kebenaran yang dibawa oleh Beliau.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai bentuk adanya keterbatasan kemampuan serta sebagai motivasi untuk lebih baik dan terus belajar kedepannya. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembacanya dan sebagai perkembangan penelitian dalam kajian ilmu social dan ilmu politik khususnya pada ilmu hubungan internasional.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan kesalahan, namun dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Kepada Ibuku tercinta, Ibu Umi Sya'diah. Ibu, terima kasih banyak ya Bu atas segala doa-doa baik, rasa sayang, semangat dan dukungan yang selalu Ibu berikan buat Hani. Terima kasih karena Ibu selalu sabar dan membesarkan hati Hani, memberikan banyak motivasi agar Hani tidak merasa pesimis atas setiap pencapaian Hani meski hal tersebut bukan merupakan pencapaian yang hebat. Mohon maaf ya Bu atas semua salah dan kesalahan Hani selama ini. Semoga Hani bisa jadi ladang pahala untuk Ibu dan Ayah serta semoga Allah berikan kesehatan lahir batin, perlindungan dan kasih sayangnya untuk Ibu aamiin. Tolong jaga kesehatan dimana pun Ibu berada, Hani harap kita bisa berkumpul kembali segera.
2. Kepada Ayahku tersayang, Bapak Fauzi Ashar yang pendiam namun bijak. Terima kasih ayah telah menempe Hani menjadi anak yang kuat. Sadar atau tidak, Hani selalu berpegangan pada nasihat-nasihat Ayah selama Hani tinggal jauh dari Ayah dan Ibu khususnya selama masa studi Hani di Lampung. Terima kasih Ayah untuk segala doa, dukungan dan kata-kata baik Ayah, terima kasih juga karena telah sabar menunggu Hani menyelesaikan studi ini. Terima kasih karena selalu menghargai setiap pencapaian kecil yang Hani raih dan untuk selalu melihat dan menilai segala hal dari berbagai sudut pandang. Doa Hani, semoga Allah lindungi dan sayangi Ayah dimana pun Ayah berada aamiin.
3. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang selalu memberikan motivasi, kritik dan saran, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Aman Toto Dwijono, M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga serta pikiran dan juga memberikan banyak masukan, saran yang membangun serta bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan membantu dalam proses pembelajaran. Terima kasih Pak Aman.
6. Bapak Iwan Sulistyو, M.A., selaku pembimbing kedua saya yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk membimbing saya. Terimakasih Mas Tyو atas pemikiran, saran dalam pengerjaan, kritik, dan motivasi yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Mas Tyو memiliki peran penting dalam pembuatan skripsi saya dari awal hingga akhir. Terima kasih sekali lagi Mas Tyو.
7. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si., selaku dosen pembahas yang telah meluangkan waktu, memberikan kritik dan saran. Terimakasih Pak Dedy, selain sebagai dosen pembahas Pak Dedy juga memiliki kontribusi penuh dalam perbaikan skripsi saya menjadi lebih baik dan terstruktur. Masukan dan saran perbaikan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada dosen-dosen jurusan Hubungan Internasional, Pak Nizar, Mas Gara, Mba Gita K, Mba Gita D, Mba Tiwi dan lainnya. Terima kasih untuk ilmu dan pengetahuannya yang bermanfaat.

9. Kepada adikku, Aulia Rizki. Ul, makasih banyak ya untuk dukungan dan semangat singkatnya namun selalu berarti. Semoga studi Aul selalu diberi kemudahan.
10. Kepada keluarga rumah Lampung, terima kasih banyak ya Teh Inah, Om Imran, Nabila, Fatih, Azzam, Datuk, Jali, mohon maaf kalau selama ini Hani merepotkan. Terima kasih banyak atas dukungan dan semangatnya, terima kasih untuk perlindungan dan rasa nyaman yang diberikan selama ini. Semoga Allah balas kebaikan kalian dengan kebaikan lainnya, Tak lupa untuk Ndek Hasan, Ndek Tsun, Tete Farida, terima kasih banyak untuk semuanya, semoga yang terbaik menyertai kalian semua.
11. Keluarga Depok, Mbah Putri (Alm), Mbah Kakung, Bulek, Om-Tante, adek-adek, terima kasih banyak untuk semangat dan dukungannya. Semoga urusan kalian selalu dipermudah.
12. “*Skripsi 1st Holiday Later*”. Fitri Fatharani, Amalia Rezki P, Rizka Amelia dan Tia Panca Rahmadhani. Terimakasih ya sudah jadi teman berproses, terimakasih sudah sediakan tempat untuk berbagi, terimakasih sudah sediakan telinga untuk mendengar keluh dan kesah, terimakasih atas kasih sayang, perhatian dan peduli yang sudah diberikan, terimakasih untuk waktu yang juga sudah diluangkan. Semoga Allah balas setiap kebaikan kalian dengan kebaikan juga, semoga Allah juga lancarkan semua urusan kalian dan melindungi kalian di manapun kalian berada. Semoga Allah izinkan kita jadi wanita sukses dan tangguh ya, aamiin! Semangat! *Let through another ‘badai’!* Hani sayang kalian. *I’ll see you soon guys!*

13. Nisrina Khansa K, terimakasih ya Mi untuk setiap semangat yang diberikan, terimakasih untuk selalu mendengar keluh dan kesah. Semoga Allah lindungi kamu juga lancarkan segala urusanmu. Untuk Rita Widiyanti, Mba Endani, terima kasih banyak. Semoga urusan kalian selalu dimudahkan aamiin.
14. Anak-anak Corpus Motus, Yuni, Dumora, Binanda, Puspa, Eka, Rima S, dan lainnya makasih banyak ya manteman semua, kalian teman-teman terbaik dan paling menghibur selama masa perkuliahan.
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, doa, mengapresiasi, memberikan pengalaman dan pelajaran hidup, saya ucapkan terimakasih. Semoga Allah S.W.T membalas seluruh kebaikan kalian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 31 Juli 2019

Penulis,

Hanifah Az Zahra

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kerangka Analitis.....	16
2.2.1 Teori <i>Foreign Policy</i>	16
2.2.2.1 <i>Changing Course</i>	17
2.2.2 Kepentingan Nasional	20
2.3 Kerangka Pemikiran	21
III. METODE PENELITIAN	23
3.1 Fokus Penelitian	24
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	24

3.3 Teknik Analisis Data.....	25
3.4 Validitas dan Realibilitas	27
3.5 Level Analisis Penelitian	27
IV. GAMBARAN UMUM	29
4.1 Arah Kebijakan Luar Negeri Pasca Runtuhnya Uni Soviet	29
4.1.1 Kebijakan Luar Negeri Kepemimpinan Boris Yeltsin	30
4.1.2 Kebijakan Luar Negeri Kepemimpinan Vladimir Putin	30
4.1.3 Kebijakan Luar Negeri Kepemimpinan Dmitry Medvedev.....	32
4.1.4 Kebijakan Luar Negeri Kepemimpinan Vladimir Putin	33
4.2 Sejarah Awal Hubungan Rusia dan Suriah	35
4.3 Konflik Suriah	37
4.3.1 Latar Belakang Konflik Suriah	37
4.3.2 Sumber Konflik Suriah	41
4.3.3 Aktor-aktor dalam Konflik Suriah	44
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	47
5.1 Perubahan Kebijakan Luar Negeri Rusia terhadap Konflik Suriah, 2015-2018	47
5.2 Agen-agen Pengubah Kebijakan Luar Negeri Rusia	62
5.2.1 <i>Leader Driven</i>	62
5.2.2 <i>Bureaucratic Advocacy</i>	70
5.2.3 <i>Domestic Restructuring</i>	77
5.2.4 <i>External Shocks</i>	78
VI. SIMPULAN DAN SARAN	80
6.1 Simpulan	80
6.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu	15
3.1. Tingkat Analisis Penelitian	28
5.1. Perubahan Kebijakan Luar Negeri Rusia Terhadap Konflik Suriah, 2015-2018	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Skema Kerangka Pikir	22
4.1. Grafik Fluktuasi Presentase Pengangguran di Suriah	42
5.1. Data Total Korban Jiwa Konflik Suriah, 2011-2017	58
5.2. <i>Power Orbits</i> dalam Kebijakan Luar Negeri Rusia 1	67
5.3. <i>Power Orbits</i> dalam Kebijakan Luar Negeri Rusia 2	77

DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
ECFR	: <i>European Council on Foreign Relations</i>
EU	: <i>European Union</i>
FSA	: <i>Free Syrian Army</i>
FSB	: <i>Federal Security Service</i>
ISIS	: <i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
KGB	: <i>Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti</i>
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
MEPP	: <i>Middle East Peace Process</i>
NATO	: <i>North Atlantic Treaty Organization</i>
SNC	: <i>Syrian national Council</i>
SNCORF	: <i>Syrian National Council for Opposition and Revolutionary Forces</i>
SNHR	: <i>Syrian Network for Human Rights</i>
UNDP	: <i>United Nations Development Programme</i>
WoDM	: <i>Weapon of Mass Destruction</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kekalahan Rusia pasca Perang Dingin mengantarkan Rusia menjadi salah satu negara yang mengalami kemunduran dan berada pada titik terendah dalam sejarah negara tersebut—di samping negara-negara dunia ketiga lainnya akibat Perang Dunia II. Perang Dingin sendiri merupakan kompetisi bipolar antara Rusia dan Amerika Serikat yang saat itu merupakan representasi dari dua kekuatan besar dunia.

Di samping itu, Arne Westad mengatakan dalam jurnal Stephen M. Walt bahwa Perang Dingin adalah kompetisi global yang dilancarkan di setiap benua di dunia.¹ Persaingan antara Moskow dan Washington membentuk banyak agenda politik dunia sejak 1940-an dan memiliki pengaruh (dalam sisi negatif) di kawasan Timur Tengah, Eropa, Afrika, Asia dan Amerika Latin. Berakhirnya Perang Dingin tentu saja membawa dampak berkepanjangan tidak hanya bagi banyak negara di seluruh dunia tetapi juga bagi Rusia sendiri—yang merupakan

¹ Walt, Stephen M, 2018, “*I Knew The Cold War, This is No Cold War*”, Foreign Policy. Diakses melalui <https://foreignpolicy.com/2018/03/12/i-knew-the-cold-war-this-is-no-cold-war/>

pemain utama.² Satu diantaranya dalam hal mempertahankan hegemoni agar dapat mengimbangi Amerika Serikat (AS) dengan tujuan utama bahwa tatanan dunia tidak seharusnya unipolar melainkan multipolar dan tentu saja dengan Rusia menjadi salah satu kekuatan besar.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Rusia berusaha mengubah citra dengan berbagai sikap bernegara yang mengandung esensi kerjasama dengan menuju semi liberalisme. Hal tersebut tentu saja tersirat dalam sikap dan kebijakan dalam negeri serta luar negeri Rusia, seperti memperbaiki sistem perekonomian dimana Rusia perlahan mulai menerapkan nilai-nilai kerjasama dan terlibat dalam organisasi serta forum dunia.

Sikap dan kebijakan bernegara Rusia dalam tatanan dunia modern saat ini, condong pada aksi intervensi terkait isu-isu global negara lain serta perlawanan terhadap terorisme. Rusia berpendapat bahwa saat ini, banyaknya terjadi praktek penggulingan rezim-rezim politik dan adanya konflik *intrastate* yang sebagian besar terjadi pada negara di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya, Afrika, Asia Selatan, serta Semenanjung Korea, menyebabkan provokasi instabilitas serta berpeluang memunculkan aksi terorisme dan kelompok ekstremisme lainnya.³ Terorisme serta perlawanan kelompok ekstremisme merupakan salah satu ciri khas yang dominan dari konflik-konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan sekitarnya.

² *Ibid.*

³ *Russian National Security Strategy, Full-text Translation (UNCLASSIFIED)*, December 2015. hal 4.

Potensi berkembangnya kelompok-kelompok ekstremisme dan kelompok Islam militan atau secara global dapat dipersepsikan sebagai kelompok terorisme tengah mengancam negara-negara di Timur Tengah khususnya Suriah. Dalam kasus ini, anggapan akan kelompok terorisme merujuk pada *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) serta kelompok-kelompok militan yang berpotensi lahir dari kelompok oposisi Suriah.

Suriah sendiri dikenal sebagai negara di kawasan Timur Tengah yang penuh dengan konflik internal dan intrik politik yang begitu kompleks sejak meletusnya perang internal pertama kali di 2011. Perang ini terjadi antara Pemerintahan Bashar Al-Assad (Presiden Suriah) dan kelompok oposisi moderat Suriah yang kontra akan Pemerintahan Bashar Al-Assad. Rusia mulai melakukan intervensi pertama kali dalam konflik Suriah pada Oktober 2015 dengan meluncurkan serangan udara.⁴ Serangan udara ini merupakan intervensi langsung yang dilakukan oleh pasukan militer Rusia. Rusia sendiri telah mengambil peran sebagai pendukung garis keras Pemerintahan Bashar Al-Assad dalam melawan kelompok oposisi yang didukung langsung oleh Amerika Serikat serta sekutunya. Secara garis besar, Bassma Kodmani dari *Syrian National Council* menyatakan bahwa perang yang terjadi di Suriah merupakan permasalahan kawasan antara Iran, Saudi Arabia, Turki dan Qatar, tetapi sekarang menjadi sebuah permainan besar antara Rusia dan Barat.⁵

⁴ Pearson, Alexander, 2017, “*Syria Conflict: What do The US, Russia, Turkey and Iran Want?*”, The SAFIA Blog (Student Association for International Affairs).

⁵ Leonard, Mark, 2015, *Russia's Great Game in Syria*, New Statesman. hal 1.

Rusia dan Suriah bukan merupakan dua negara yang memiliki hubungan yang dekat pada mulanya.⁶ Ketika Hafiz Al-Assad (Presiden Suriah sebelumnya) meninggal dunia pada Juni 2000, saat itu hubungan yang terjalin antara Suriah dan Rusia pun belum berjalan terlalu baik—mengingat Rusia telah menjalin hubungan baik lebih dahulu dengan Israel, bahkan ketika Bashar Al-Assad (Presiden Suriah saat ini) didaulat menjadi Presiden Suriah menggantikan ayahnya, Hafiz Al-Assad, hubungan antara dua negara tersebut pun belum terlihat harmonis. Namun tidak menunggu lama untuk melihat perubahan sikap politik diantara kedua negara tersebut, pada Oktober 2000, hubungan antara Rusia di bawah Pemerintahan Vladimir Putin dan Suriah di bawah Pemerintahan Bashar Al-Assad mulai mengalami kemajuan dengan perkembangan yang signifikan. Kedua negara ini pun mulai melakukan perundingan kerjasama yang akhirnya berujung pada dukungan Rusia kepada Suriah pada tahun 2015. Intervensi Rusia terhadap konflik Suriah ini dapat dikatakan sebagai intervensi terbesar Rusia selama memupuk pengaruhnya di Timur Tengah.⁷

Intervensi dan aksi Rusia di Suriah tentu saja telah diproses terlebih dahulu melalui proses panjang keputusan-keputusan domestik yang terangkum dalam kebijakan luar negeri Rusia itu sendiri. Kebijakan luar negeri Rusia terhadap Suriah diawali dengan keinginan Rusia untuk melakukan aksi perlawanan terhadap kelompok terorisme, melihat konflik yang terjadi di Suriah antara Pemerintahan Bashar Al-Assad dan kelompok oposisi berpeluang untuk

⁶ Katz, Mark N, 2006, *Putin's Foreign Policy Toward Syria*, Middle East Review of International Affairs, Vol.10, hal 53.

⁷ Angela, Stent (2016), *Putin's Power Play in Syria*, New York, Foreign Affairs ; New York Vol. 95, hal 1.

menghadirkan ancaman terorisme di dalamnya.⁸ Konflik yang terjadi di Suriah dipicu oleh cara kepemimpinan Bashar Al-Assad yang dinilai diktator oleh sebagian besar masyarakat Suriah. Oleh karena itu terciptalah konflik yang melibatkan dua kubu yaitu kubu Bashar Al-Assad dengan kubu oposisi moderat Suriah yang menentang Pemerintahan Bashar Al-Assad.

Berawal dari keinginan untuk melawan terorisme—yang tentu saja dengan alasan untuk tetap mempertahankan eksistensi dan *prestige* di dunia internasional—Rusia terus melakukan intervensi sampai akhirnya teguh untuk mendukung Pemerintahan Assad. Kesungguhan Rusia mendukung Pemerintahan Bashar Al-Assad dalam mengungguli kubu oposisi Suriah ditandai dengan upaya Rusia dalam melakukan modernisasi terhadap persenjataannya, hal tersebut dilakukan guna menyokong kemenangan kubu Assad dalam konflik Suriah.⁹

Berbagai upaya dilakukan oleh Rusia demi melancarkan dukungannya terhadap rezim Assad diantaranya dengan memasok persenjataan dan bekerjasama atas *air defense missile system*, *oil* serta *gas deposits* selain itu Rusia menggunakan hak vetonya untuk menolak *draft* resousi PBB yang akan menghukum atau memberikan sanksi terhadap rezim Bashar Al-Assad.¹⁰ Hingga akhirnya pada awal tahun 2017, Rusia memutuskan untuk melaksanakan perundingan damai konflik Suriah bersama Turki dan Iran serta Amerika Serikat.

⁸ *Ibid*, hal 3. Seperti yang dikatakan oleh Putin bahwa runtuhnya Suriah akan memunculkan serta membantu mobilisasi kelompok terorisme.

⁹ The Military Balance (2017). *Military Balance: Chapter Five, Russia and Eurasia*. Routledge-Taylor and Francis Group. Hal 183.

¹⁰ Katz, Mark N (2006), *Putin's Foreign Policy Toward Syria*, Middle East Review of International Affairs, Vol.10, hal 56.

Intervensi langsung Rusia dalam konflik ini diklaim telah sesuai dengan aturan norma dan hukum internasional yang berlaku. Hal ini juga didasari karena intervensi Rusia didahului oleh permintaan Pemerintahan berdaulat Suriah.¹¹ Rusia dalam perkembangannya telah mengembangkan berbagai kebijakan luar negerinya demi mencapai Suriah yang damai, namun cakupan konflik ini semakin meluas dan rumit. Menilik perkembangan sikap serta kebijakan luar negeri Rusia dalam setiap aksinya dalam konflik Suriah pada rentang waktu 2015 sampai dengan 2018, penulis berpendapat bahwa terjadi perubahan-perubahan di dalamnya baik perubahan dari segi maksud, tujuan serta orientasi internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Pada umumnya, berbagai kebijakan luar negeri Rusia yang telah dirumuskan dan diaplikasikan terhadap konflik di Suriah merupakan upaya-upaya yang sejatinya diharapkan dapat membawa Suriah menuju titik damai.

Pemerintah Rusia menjelaskan bahwa penggulingan rezim-rezim politik pada kawasan Timur Tengah dan sekitarnya merupakan wilayah yang dipengaruhi oleh konflik bersenjata yang kemudian menjadi basis penyebaran terorisme, perselisihan antaretnis, permusushan agama dan manifestasi ekstremisme lainnya.¹² Pernyataan serta bentuk peringatan yang disuarakan langsung oleh Vladimir Putin nyatanya bertolak belakang dengan aksi yang dilakukan Rusia ke Suriah saat ini. Rusia melakukan berbagai serangan serta aksi militer, alih-alih

¹¹ Pernyataan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Yurievich Galuzin dalam CNN Indonesia.

¹² *Russian National Security Strategy, Full-text Translation (UNCLASSIFIED)*, December 2015.

melakukan upaya perdamaian Suriah sejak awal aksi intervensi pada 2015 silam. Aksi militer dan intervensi Rusia sendiri yang berujung pada; pertama, berbagai kebijakan luar negeri Rusia yang merugikan masyarakat Suriah; kedua, aksi militer saling berbalas Rusia, Amerika Serikat, dan pihak lainnya dalam konflik ini juga semakin menambah intensi konflik dan pertumpahan darah serta berpeluang besar untuk melahirkan gelombang terorisme baru disamping ISIS.

Sejatinya, Rusia—sejak awal memasuki fase baru bernegara setelah runtuhnya Uni Soviet—memiliki keinginan kuat untuk berperang melawan terorisme itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya penjelasan serta pernyataan lebih lanjut mengenai bahasan terkait perlawanan terhadap terorisme dalam *Russian National Security Strategy* pada Desember 2015. Juru bicara kepresidenan Rusia, Dmitry Peskov juga menyatakan bahwa Rusia sendiri akan terus berusaha melawan terorisme di Suriah.

Berangkat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Rusia berubah, dalam hal perlawanan untuk memerangi terorisme dan menutup kemungkinan munculnya gelombang baru terorisme serta dalam berbagai kebijakan yang diambil dan kemudian diaplikasikan terhadap konflik Suriah sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2018. Maka dari itu, peneliti hendak menjawab pertanyaan mendasar yakni, **“Apa perubahan kebijakan luar negeri Rusia terhadap konflik Suriah tahun 2015-2018 dan, agen-agen pengubah kebijakan luar negeri tersebut?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan tentang konflik Suriah tahun 2015-2018 yang mencakup latar belakang konflik, sumber konflik, aktor-aktor yang terlibat.
2. Menganalisis perubahankebijakan luar negeri Rusia terhadap konflik Suriah tahun 2015-2018 serta agen-agen pengubah kebijakan luar negeri Rusia tersebut.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Segi Keilmuan

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber baca dalam lingkungan akademisi dan umum dalam kajian terkait polemik konflik Suriah dan kebijakan luar negeri Rusia terhadap konflik Suriah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan baik dari segi data yang disajikan, konsep atau kerangka teoritis yang digunakan serta analisis analisis yang dipaparkan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi guna terciptanya penelitian dengan pokok bahasan yang serupa namun dengan perbedaan objek, peiode waktu atau sudut pandang penelitian, agar dapat memperkaya referensi tentang hubungan Rusia dan Suriah dalam momentum konflik di Suriah.

1.4.2 Segi Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menyusun serta mengembangkan kajian literatur tentang sikap dan kebijakan luar negeri Rusia serta konflik Suriah.
2. Substansi, saran serta rekomendasi dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pemerintah negara berkonflik, untuk kemudian dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan sikap dan kebijakan yang relevan baik bagi negara berkonflik itu sendiri maupun negara-negara yang terlibat di dalamnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tema penelitian yang sama tentang kebijakan luar negeri Rusia terhadap Suriah telah dilakukan sebelumnya oleh Mark Leonard, seorang ahli politik asal Inggris merangkap seorang penulis serta seorang direktur European Council on Foreign Relations (ECFR). Penelitian ini berjudul “*Russia’s Great Game in Syria*”, dalam penelitian ini, Leonard lebih senang menggunakan ‘*Putin*’ sebagai konotasi yang tepat bagi ‘*Rusia*’. Leonard berfokus pada : 1) sikap dan keinginan Putin yang dinilai terkesan lebih mementingkan bagaimana ia dapat dikenal sebagai pemimpin revolusioner bagi Suriah, khususnya dalam konflik Suriah saat ini melalui kebijakan serta intervensi yang diambil, 2) kampanye militer Rusia terhadap konflik Suriah.

Meski dirasa Putin menggunakan keterlibatannya di Suriah sebagai salah satu cara menaikkan kembali *prestige*-nya di mata dunia terutama terhadap Barat, tetapi kebijakan-kebijakan yang diambil perlu diperhitungkan dan menarik untuk dikaji. Penelitian ini diawali dengan dua kebijakan, yang pertama kebijakan Rusia untuk mendukung Pemerintahan Bashar Al-Assad (Presiden Suriah saat ini) dalam mempertahankan keutuhan negara Suriah. Kedua, kebijakan Rusia yang turut fokus memerangi ISIS. Dari kedua poin penting ini, Rusia dinilai lebih fokus

menopang dan mendukung rezim Bashar Al-Assad dalam mempertahankan keutuhan Suriah dibandingkan melawan terorisme. Leonard juga mengemukakan pendapatnya dengan mempertimbangkan pandangan berbagai ahli dan pengamat terhadap sikap Rusia dan kebijakannya di Suriah.

Berbeda dengan penelitian Leonard yang secara keseluruhan berbicara mengenai keinginan Putin secara pribadi untuk terus diakui di Suriah—dalam hal ini, semua hal yang ada dalam pribadi seorang Vladimir Putin kerap kali dinilai sebagai keseluruhan dari Rusia, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini lebih berfokus pada analisis perubahan kebijakan luar negeri Rusia terhadap Suriah.

Penelitian lain dengan tema yang sama juga dilakukan oleh Angela Stent, seorang direktur dari *Center for Eurasian, Russian, and East European* serta seorang *senior fellow* di Transatlantic Academy. Penelitiannya berjudul “*Putin’s Power Play in Syria*”. Pada penelitian ini, di awal tulisannya memberikan sedikit banyak analisis tentang hipotesis-hipotesis terkait kerjasama Rusia dan Amerika Serikat di Timur Tengah atas dasar kesamaan visi dan keinginan untuk melawan terorisme serta sedikit informasi tentang aksi-aksi Rusia, seperti contohnya, Rusia melakukan serangan udara di Suriah, dilakukan dengan maksud berpura-pura melawan kelompok teroris. Serangan udara yang dilakukan oleh Rusia dinilai menjadi intervensi terbesar Rusia di kawasan Timur Tengah dalam beberapa dekade terakhir ini. Dalam membahas topik ini, penulis juga sedikit banyak menjabarkan pandangannya terkait hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat, dimana Rusia dan Amerika Serikat seolah menyinggung kembali makna *proxy war* dan kondisi dunia bipolar.

Namun secara keseluruhan, Stent bercerita tentang kebijakan-kebijakan yang diambil Rusia di Suriah. Dimulai dari kekhawatiran Rusia akan *power* dan pengaruhnya sehingga Rusia mengintervensi Suriah secara militer. Namun sebelum masuk membahas kebijakan-kebijakan apa saja yang diambil Rusia, Stent sedikit banyak mengemukakan pandangannya tentang bagaimana eratnya kaitan antara Rusia dan Amerika Serikat, Stent menilai jika segala sesuatu yang dilakukan oleh Rusia maka hal tersebut akan memancing reaksi Amerika Serikat, begitu pun sebaliknya. Di samping itu, Stent menilai bahwa salah satu alasan Rusia sangat kuat dalam mendukung rezim pemerintahan Suriah ialah ketakutan akan melemahnya pengaruh dan daya intervensinya setelah melakukan aneksasi atas Krimea. Setelah penjelasan tentang hal-hal tersebut, Stent mulai membahas kebijakan-kebijakan Rusia di Suriah.

Terdapat sedikit banyak perbedaan fokus penelitian antara penelitian Stent dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Stent lebih banyak melakukan analisis tentang hubungan Rusia dan Amerika Serikat dan beberapa kebijakan luar negeri Rusia dalam konflik Suriah. Di samping itu, penulis lebih akan berfokus meneliti sikap dan kebijakan-kebijakan lain dan yang tengah diambil Rusia di Suriah—tidak hanya berfokus pada konflik Suriah semata.

Terdapat penelitian dengan tema yang sama ditulis oleh Mark N. Katz, ia merupakan seorang professor di George Mason University, Amerika Serikat sekaligus peneliti tentang politik dan kebijakan luar negeri Rusia, revolusi serta bahasan *War on Terror*. Dalam penelitiannya yang berjudul “*Putin’s Foreign Policy Toward Syria*”, ia memaparkan bahasan terkait hubungan Rusia-Suriah yang tidak terlalu dekat selama lima tahun kepresidenan Putin namun hubungan

tersebut tiba-tiba mengalami kemajuan dan meningkat di awal tahun 2005. Di lain sisi, penelitian Katz juga fokus pada upaya Putin (Rusia) yang berusaha menjaga hubungan baik dengan Suriah dan Israel secara bersamaan.

Dalam tulisannya, ia menjelaskan bahwa hubungan Rusia dan Suriah tidak memiliki hubungan yang dekat sebelumnya, bahkan Rusia lebih memiliki hubungan yang dekat dengan Israel. Namun pada awal 2005, hubungan Rusia-Suriah mengalami perkembangan pesat yang menakjubkan. Dalam tulisannya, Katz mengutip cuplikan berita dari salah satu surat kabar terkenal Rusia—*Izvestia*—tentang tiga alasan mengapa Russia (Moscow) ingin menjalin hubungan baik dengan Suriah, diantaranya : 1) Rusia dirasa mampu untuk mempengaruhi Suriah untuk berdamai dengan Israel. 2) Adanya pelabuhan Tartus di Pantai Suriah yang merupakan satu-satunya pangkalan angkatan laut di Laut Mediterania. 3) Damascus yang telah menyiapkan “*cold cash*” untuk Moscow demi meng-*upgrade* senjata-senjata lama menjadi baru. Selain itu, Katz juga membahas mengenai sedikit persetujuan yang terjadi antara Rusia dan Suriah mengenai sistem pertahanan misil udara dan *new oil* dan *gas deposits*.

Selanjutnya, penelitian dengan tema yang serupa juga telah dilakukan sebelumnya oleh Romi Novrizon, seorang mahasiswa lulusan Universitas Riau, dengan judul “*Kebijakan Rusia Mendukung Rezim Bashar Al-Assad Dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2012*”. Romi memfokuskan penelitiannya pada alasan mengapa Rusia mendukung rezim Bashar Al-Assad.

Dalam tulisannya, ia menjelaskan bahwa konflik di Suriah terjadi karena adanya protes dari rakyat Suriah yang menginginkan mundurnya Bashar Al-Assad

yang dianggap otoriter. Terdapat dua kubu di Suriah, antara Pemerintah Bashar Al-Assad dan kubu oposisi. Rusia tidak ingin kehilangan pengaruhnya di Timur Tengah dan mendukung Suriah merupakan salah satu langkahnya dalam mewujudkan hal tersebut. Di tengah banyaknya kecaman dan protes masyarakat internasional terhadap Assad, Rusia justru semakin mendukung penuh aksi yang dilakukan oleh rezim Assad salah satunya dengan mengirimkan senjata dan peluru kendali ke Suriah. Selain mengirimkan pasokan senjata, Rusia juga menggunakan hak vetonya untuk menolak *draft* resolusi PBB yang akan menghukum atau memberikan sanksi terhadap rezim Bashar Al-Assad.

Penelitian yang dikaji oleh Romi Novrizon memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini yaitu penulis akan lebih menekankan pada perbandingan dan perubahan kebijakan luar negeri Rusia terhadap Suriah pada awal Rusia memutuskan untuk mendukung rezim Bashar Al-Assad hingga periode waktu saat ini.

Jika digambarkan, perbedaan mendasar dari masing-masing penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu	Mark Leonard (2015)	Angela Stent (2016)	Mark Norman Katz (2006)	Romi Novrizon (2012)
Topik Penelitian	<i>Russia's Great Game in Syria</i>	<i>Putin's Power Play in Syria</i>	<i>Putin's Foreign Policy Toward Syria</i>	<i>Kebijakan Rusia Mendukung Rezim Bashar Al-Assad Dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2012</i>
Objek Penelitian	Alasan Putin serta kebijakan Rusia dalam konflik Suriah	Hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat serta beberapa kebijakan yang diambil Rusia terhadap Suriah.	Proses terbentuknya hubungan Rusia dan Suriah.	Penyebab konflik di Suriah serta dukungan Rusia yang diberikan kepada rezim Bashar Al-Assad.
Pendekatan	Pendekatan kualitatif	Pendekatan historis dan kualitatif	Pendekatan historis dan kualitatif	Pendekatan historis dan kualitatif
Teori/Konsep	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori <i>Elite</i> Politik 2. <i>Global War on Terror</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Proxy war</i> 4. Bipolar 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Hegemoni 6. Kerjasama 7. <i>Common interest</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 8. Teori politik luar negeri dan <i>national interest</i>.
Kesimpulan	Sikap dan keinginan Putin yang dinilai terkesan lebih mementingkan bagaimana ia dapat dikenal sebagai pemimpin revolusioner bagi Suriah, khususnya dalam konflik Suriah saat ini melalui kebijakan serta intervensi yang diambil. Rusia dinilai lebih fokus menopang dan mendukung rezim Bashar Al-Assad dalam mempertahankan keutuhan Suriah dibandingkan melawan terorisme.	Rusia dan Amerika Serikat seolah menyinggung kembali makna <i>proxy war</i> dan kondisi dunia bipolar. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Rusia maka hal tersebut akan memancing reaksi Amerika Serikat, begitu pun sebaliknya. Salah satu alasan Rusia sangat kuat dalam mendukung rezim pemerintahan Suriah ialah ketakutan akan melemahnya pengaruh dan daya intervensinya setelah melakukan aneksasi atas Krimea.	Hubungan Rusia dan Suriah mulai terjalin baik menjadi hubungan yang dekat terjadi pada awal tahun 2005. Akibat hal tersebut, Rusia mulai mendukung keputusan Suriah dengan memasok persenjataan dan bekerjasama atas <i>air defense missile system</i> , <i>oil</i> serta <i>gas deposits</i> . Hubungan yang baik pun terus dijaga oleh Rusia terhadap Suriah karena Rusia memiliki pangkalan militer angkatan Laut di lepas pantai Suriah untuk menguasai Laut Mediterania.	Konflik di Suriah terjadi karena adanya protes dari rakyat Suriah yang menginginkan mundurnya Bashar Al-Assad yang dianggap otoriter. Rusia tidak ingin kehilangan pengaruhnya di Timur Tengah dan mendukung Suriah merupakan salah satu langkahnya. Di tengah banyaknya kecaman dan protes masyarakat internasional terhadap Assad, Rusia justru semakin mendukung penuh aksi yang dilakukan oleh rezim Assad salah satunya dengan mengirimkan senjata dan peluru kendali ke Suriah. Rusia menggunakan hak vetonya untuk menolak <i>draft</i> resolusi PBB yang akan menghukum atau memberikan sanksi terhadap rezim Bashar Al-Assad.

Sumber : Data diolah oleh peneliti

2.2 Kerangka Analitis

2.2.1 Teori *Foreign Policy*

Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan perubahan-perubahan signifikan pada kebijakan luar negeri Rusia terhadap Suriah dengan menggunakan landasan teori *Foreign Policy* secara umum dan landasan perubahan-perubahan kebijakan tersebut secara khusus. Teori ini serta turunannya dipandang relevan karena kebijakan-kebijakan Rusia yang berdampak pada setiap aksi dan keputusannya di Suriah terutama terhadap politik serta dinamika konflik disana dianggap banyak mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan yang terjadi dipandang cukup membingungkan karena adanya ketidakkonsistenan sikap domestik Rusia dengan kebijakan yang diambil dalam aksi internasionalnya.

Pembuatan kebijakan luar negeri dianggap menjadi salah satu fitur utama dalam politik internasional. Kebijakan luar negeri suatu negara mencerminkan pentingnya negara tersebut mengelola hubungan dengan negara-negara lain serta badan-badan internasional.¹³ Dalam bukunya yang berjudul *Global Politics*, Heywood menjelaskan bahwa pengambilan keputusan luar negeri kerap kali dianggap suatu kegiatan politik yang mulia dan tinggi karena berisi tentang isu kedaulatan dan keamanan yang akan berpengaruh langsung terhadap kelangsungan hidup negara pengambil kebijakan tersebut.

¹³Heywood, Andrew (2011). *Global Politics*. Palgrave Macmillan. Hal 128.

Konsep kebijakan luar negeri dijelaskan pula dalam definisi klasik dan detail oleh Walter Carlsnaes seperti berikut,

“ Tindakan-tindakan yang diarahkan ke tujuan, kondisi, dan aktor (baik pemerintah maupun non pemerintah) yang beredar di luar wilayah teritorial mereka dan yang ingin mereka pengaruhi. Tindakan-tindakan itu diekspresikan dalam bentuk tujuan-tujuan, komitmen dan atau arah yang dinyatakan secara eksplisit, dan yang dilakukan oleh wakil-wakil pemerintah yang bertindak atas nama negara atau komunitas yang berdaulat” (Walter Carlsnaes,...).

2.2.1.1 Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy

Dalam menjelaskan perubahan-perubahan kebijakan luar negeri Rusia terhadap Suriah, penulis menggunakan skema pengembangan dari teori *foreign policy* yaitu “***Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy***” yang diambil dari jurnal yang ditulis oleh Charles F. Hermann dari The Ohio State University. Dalam konteks pengambilan keputusan suatu kebijakan luar negeri, perubahan-perubahan tentu saja akan terus terjadi mengikuti sistem internasional.

Menurut Charles F. Hermann (1990), perubahan kebijakan luar negeri dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk perubahan diantaranya : (1) *changes in mean/program*, (2) *changes in goal/problem*, (3) *changes in international orientation*.¹⁴ Ada pun empat hal yang dapat dieksplorasi lebih jauh lagi mengenai perubahan kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu :

¹⁴ Hermann, Charles F. *Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy* Vol. 34. Wiley behalf of The International Studies Association.

- a. ***Domestic political system*** (Sistem politik domestik), yang dapat memengaruhi kebijakan luar negeri melalui dinamika berbeda seperti isu-isu yang menjadi inti dari perjuangan kekuasaan politik, sikap atau keyakinan dari kontituen domestik, serta penataan ulang esensi rezim suatu negara. Selain itu, terdapat dua hal yang perlu dilakukan untuk mengubah kebijakan luar negeri dalam sistem politik domestik yaitu harus ada pengubah dalam sistem tersebut dan perubahan sistem harus merupakan perubahan besar bagi kebijakan luar negeri dalam pemerintahan.
- b. ***Bureaucratic decision making*** (Pembuatan kebijakan birokrasi), perubahan kebijakan luar negeri dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh birokrat cenderung merujuk pada individu dalam suatu organisasi. Informasi dan kecakapan dalam pengumpulan serta proses analisis dilakukan secara individual, biasanya dilakukan oleh seorang yang profesional seperti para menteri, kepala agensi, anggota kabinet dan lain sebagainya, sebelum diimplementasikan lebih lanjut.
- c. ***Cybernetics*** (Sibernetika), merupakan pendekatan sibernetikis dan teori kontrol untuk menangani perubahan tentang kebijakan luar negeri. Dalam hal ini lebih bergantung pada agen yang ada. Proses ini mengandung dua unsur yaitu konsep informasi umpan balik atau *feed-back* dan kontrol atau *steering*.
- d. ***Learning approaches***, proses ini membutuhkan waktu yang melampaui hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri. Proses pembelajaran dalam konteks ini merupakan bentuk pemecahan masalah

yang mungkin cukup instruktif dalam mempertimbangkan perubahan kebijakan luar negeri suatu negara.

Hermann menjelaskan bahwa perubahan kebijakan luar negeri dapat ditempatkan pada suatu kontinum yang menunjukkan besarnya pergeseran dari perubahan-perubahan kecil, baik melalui program, strategi, sasaran atau perubahan mendasar dalam orientasi suatu negara. Derajat perubahan kebijakan luar negeri dapat ditentukan sehubungan dengan agen-agen perubahannya, diantaranya¹⁵ :

1. **Leader driven**, dimana perubahan kebijakan luar negeri suatu negara ditentukan dari pembuat kebijakan yang berwibawa dan hal tersebut cenderung dilakukan oleh kepala pemerintahan. Pemimpin harus memiliki kekuatan, keyakinan serta energi untuk memaksa pemerintahnya mengubah atau redireksi arah suatu kebijakan.
2. **Bureaucratic advocacy**, merupakan advokasi birokrasi yang berperan sebagai salah satu agen pengubah suatu kebijakan luar negeri, namun dapat ide dan pemikirannya terkesan bersifat kontradiktif atau berlawanan dari kebijakan-kebijakan utama dalam pemerintahan.
3. **Domestic restructuring**, merujuk pada segmen masyarakat secara politik relevan yang dukungannya perlu diatur oleh rezim dan kemungkinan bahwa segmen masyarakat ini dapat menjadi agen perubahan.
4. **External shock**, biasanya menjadi sumber perubahan kebijakan luar negeri yang dihasilkan dari peristiwa atau fenomena internasional. Adanya dampak yang diberikan oleh peristiwa dan fenomena

¹⁵*Ibid*, hal 3.

internasional, maka hal tersebut biasanya dapat menjadi pemicu suatu negara melakukan perubahan arah kebijakan luar negerinya.

2.2.2 Kepentingan Nasional

Setiap tindakan suatu negara dipengaruhi oleh kepentingan nasional negara tersebut sehingga kepentingan nasional menjadi hal yang banyak mempengaruhi perumusan kebijakan serta arah politik luar negeri suatu negara.¹⁶

Konsep kepentingan nasional juga diperkuat dengan pernyataan dari Charles Lerche and Abdul sebagai berikut :

“National Interest means: “The general, long term and continuing purpose which the state, the nation, and the government all see themselves as serving.” (Charles O. Lerche, Abdul Aziz Said, 2010).

Kepentingan nasional merupakan hal yang harus dicapai dalam suatu kebijakan luar negeri berbentuk sebuah tujuan dan sasaran. Baik tujuan dan sasaran berbeda satu sama lain sehubungan dengan rentang waktu yang dicakup, maka dari itu kepentingan nasional bersifat jangka panjang.

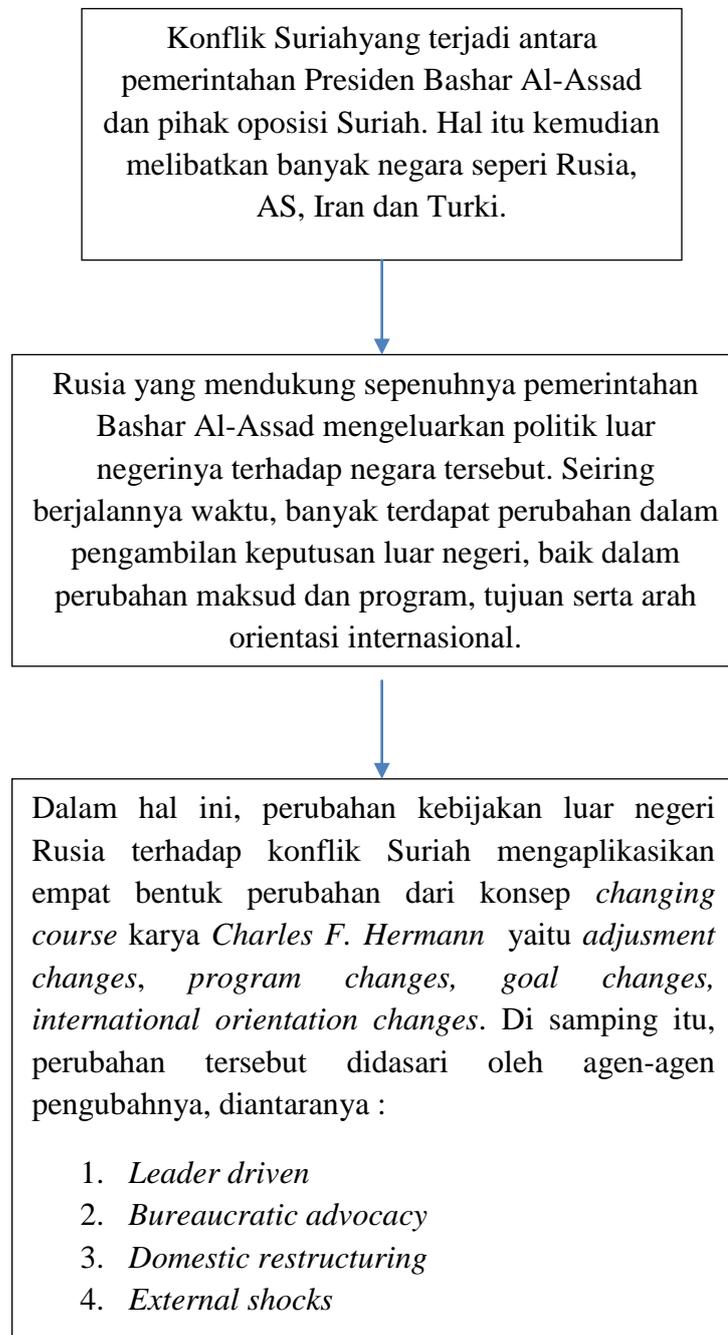
Rusia mewujudkan kepentingan nasionalnya melalui aksi yang dihasilkan dari kebijakan luar negerinya terhadap konflik Suriah. Dalam hal ini, motif politik, ekonomi dan mempertahankan *prestige* sebagai negara besar merupakan hal utama yang terus dilakukan Rusia di salah satu negara di kawasan Timur Tengah tersebut.

¹⁶ Morgenthau, Hans J (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. The University of Chicago. New York, hal 16.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir diawali ketika penulis menyadari bahwa terdapat banyak negara yang melakukan intervensi dalam konflik dan permasalahan di Suriah, salah satu yang memiliki peran utama ialah Rusia—dengan mendukung pihak Pemerintahan Bashar Al Assad. Aksi-aksi dalam mendukung pihak Assad akhirnya diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan luar negeri mereka, meski kebijakan dan politik luar negeri Rusia juga merupakan tujuan dan sasaran atas kepentingan nasional negara tersebut. Konflik Suriah serta berbagai sikap dan kebijakan yang telah atau akan diterapkan merupakan siklus yang terus berlanjut. Bahasan mengenai topik yang didasari oleh kerangka pikir ini dibahas melalui pendekatan-pendekatan dalam keilmuan Hubungan Internasional seperti konsep kepentingan nasional, teori *foreign policy* serta konsep lain mengenai perubahan dan pergeseran kebijakan luar negeri suatu negara. Perubahan kebijakan luar negeri Rusia terhadap konflik di Suriah pada penelitian ini menggunakan konseptualisasi dari Charles F. Hermann yaitu “*Changing Course: When Government Choose to Redirect Foreign Policy*”.

Ada pun skema kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :



Sumber: Diolah oleh Peneliti

Gambar 2.1. Kerangka Pikir.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berbasis pada masyarakat atau tindakan masyarakat, namun dirancang menggunakan paradigma ‘ilmiah’ untuk memberikan keabsahan eksternal dan pengetahuan lokal. Anne E. Broadsky berpendapat bahwa tujuan penting dari metode kualitatif adalah penemuan, yaitu, mengembangkan deskripsi sistem, teori dan proses yang holistik dan komprehensif, serta mengidentifikasi faktor dan hipotesis kerja yang menjamin penelitian lebih lanjut. Di samping itu, penelitian ini menggunakan *case study* sebagai cara dalam meneliti fenomena kontemporer sosial saat ini terkait perubahan kebijakan luar negeri Rusia terhadap Suriah. Penjelasan (*explanatory*) dalam *case study research strategy* dilakukan melalui dua proses yaitu *exploratory* dan *descriptive*. Secara garis besar, Yin membagi jenis studi kasus sesuai tujuan penelitiannya, yaitu studi kasus deskriptif, studi kasus eksploratif, dan studi kasus eksplanatif.¹⁷

Metode penyajian data dalam penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Data akan disajikan dalam bentuk penjelasan deskriptif yang berarti menggambarkan dan menjelaskan secara lengkap dan keseluruhan fenomena dan

¹⁷ Yin, Robert, K. 2003, “*Case Study Research: Design and Methods (3rd ed.)*”, United Kingdom: Sage Publications, Inc. Hlm. 1

masalah yang diteliti. Secara keseluruhan, tujuan penting dari penggunaan metode penelitian kualitatif adalah terciptanya suatu penemuan—yaitu dengan mengembangkan deskripsi sistem, teori dan proses yang bersifat holistik dan komprehensif, serta mengidentifikasi faktor dan hipotesis kerja yang dapat menjamin penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini, tipe analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana aksi Rusia melalui kebijakan luar negeri serta perubahan-perubahan yang mengikuti setelahnya terhadap konflik Suriah demi mewujudkan penyelesaian konflik tersebut.

3.1 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini diantaranya : 1) Perubahan kebijakan luar negeri Rusia terhadap konflik Suriah, 2015-2018, 2) Agen-agen pengubah kebijakan luar Negeri Rusia terhadap konflik Suriah, 2015-2018.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi dari data sekunder. Data sekunder sendiri didefinisikan sebagai sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015:137). Data sekunder dapat berupa :

1. Studi Pustaka

Studi pustakan dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, koleksi perpustakaan, literatur sejarah dan lain sebagainya, seperti diantaranya : Data konflik Suriah, sejarah kepemimpinan Bashar Al-Assad yang didapat dari berbagai laman berita Timur Tengah serta data kebijakan luar negeri Rusia dan sejarah pengambilan keputusan di Rusia melalui jurnal tahunan internal Michenko dan lainnya.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Sugiyono, 2015). Dokumen khusus seperti *military balance* Rusia dan negara-negara kawasan Timur Tengah, data-data terkait yang diakses melalui laman *online* kedutaan besar Rusia serta berita harian Rusia dan Suriah. Selain itu, data juga dikumpulkan dari berbagai laman *online* yang selaras dengan topik penelitian diantaranya *Reuters*, *Pars Today*, *RBTH*, *Foreign Affairs* dan lainnya.

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan bersumber dari pemikiran Miles dan Huberman diantaranya :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang tersedia di lapangan memiliki jumlah yang banyak, sehingga mereduksi data dengan cara memilih hal-hal utama, memfokuskan pada hal-hal penting, merangkum serta membuang informasi tidak perlu merupakan proses yang harus dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mereduksi data seperti data-data kebijakan luar negeri Rusia yang diterapkan dalam konflik Suriah, memilih informasi sejarah terkait Rusia dan Suriah serta fokus terhadap data-data perkembangannya.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menyampaikan melalui teks yang bersifat naratif serta menampilkan gambar, grafik, diagram, tabel dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, data yang bersifat gambar, grafik, tabel dan lain sebagainya akan memuat informasi yang berkaitan langsung dengan konflik Suriah, perubahan kebijakan luar negeri yang Rusia ambil terhadap konflik Suriah pada periode yang telah ditetapkan, dan aktor-aktor pengambilan kebijakan luar negeri Rusia.

3. Verifikasi atau *Conclution Drawing*

Penarikan kesimpulan serta verifikasi merupakan tahapan akhir dari penelitian. Kesimpulan penelitian didapatkan dari hasil analisis yang didukung dengan reduksi informasi-informasi yang telah dilakukan. Kesimpulan penelitian ini juga akan menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu bagaimana perubahan kebijakan luar negeri Rusia terhadap konflik Suriah pada tahun 2015-2018.

3.4. Validitas dan Realibilitas

Makna dari validitas ialah keabsahan atau kebenaran dalam penelitian, sedangkan realibilitas diartikan sebagai hal atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan serta konsisten.¹⁸ Dalam penelitian ini, uji validitas dan realibilitas dilakukan dengan cara triangulasi sumber data dimana peneliti mengamati dan membandingkan informasi atau data dari berbagai sumber yang berbeda. Dalam penelitian sosial, triangulasi dianjurkan untuk membangun suatu prinsip melalui observasi yang dilakukan dengan berbagai perspektif dibanding hanya dengan menggunakan satu perspektif saja sehingga dapat tercipta ide-ide yang mengandung poin-poin utama dari berbagai sudut pandang, hal tersebut dapat meningkatkan derajat keabsahan dan keakuratan suatu penelitian.¹⁹

3.5. Level Analisis Penelitian

Level atau tingkat analisis merupakan merupakan sasaran analisis dalam suatu penelitian. Dalam proses memilih tingkat analisis, peneliti menetapkan unit analisis dan unit eksplanasi. Unit analisis ialah perilaku yang hendak dideskripsikan, dijelaskan dan diramalkan (variabel dependen) sedangkan unit

¹⁸ Neumann, W. Lawrence (2011). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th Edition)*. Pearson.

¹⁹ *Ibid.*

eksplanasi ialah sesuatu yang dampaknya terhadap unit analisis (variabel independen).²⁰

Tabel 3.1. Tingkat Analisis Penelitian

Level/Tingkat Analisis : Negara-bangsa	
Unit Analisis	Unit Eksplanasi
Perubahan kebijakan luar negeri Rusia Terhadap Konflik Suriah, 2015-2018	Konflik Suriah 2015-2018

Sumber : Diolah Peneliti.

²⁰Mas' oed, Mochtar (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta. LP3ES. Hlm. 40

BAB IV

GAMBARAN UMUM

Bab ini merupakan gambaran umum mengenai arah kebijakan luar negeri Rusia, kebijakan luar negeri Rusia di Timur Tengah khususnya di Suriah, hubungan Rusia dan Suriah serta paparan mengenai konflik Suriah. Bahasan-bahasan tersebut akan memberikan paparan mengenai keterkaitan antara *output* dari kebijakan luar negeri Rusia terhadap konflik di Suriah. Pada bab ini juga akan memaparkan beberapa motif yang mendasari kepentingan nasional Rusia sehingga hal tersebut melatarbelakangi kebijakan luar negeri Rusia terhadap konflik Suriah, 2015-2018.

4.1 Arah Kebijakan Luar Negeri Rusia Pasca Runtuhnya Uni Soviet

Rusia merupakan negara terbesar di dunia berdasarkan luas geografis. Luasnya sekitar 17.075.400 km² atau 11,46% dari total luas lahan bumi.²¹ Rusia merupakan salah satu negara yang memiliki serangkaian sejarah yang panjang. Pasca kekalahan Uni Soviet di Perang Dunia II, tepatnya pada tahun 1985, Mikhail Gorbachev mengumumkan terkait *perestroika* yaitu serangkaian reformasi politik dan ekonomi. Hasil dari keputusan tersebut, Uni Soviet mengalami disintegrasi. Disintegrasi ini ditandai dengan disahkannya

²¹ Dikutip dari “Tentang Rusia” dalam Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia, melalui https://indonesia.mid.ru/web/indonesia_ind/tentang-rusia.

referendum yang diadakan pada 12 Desember 1993 dengan mengadopsi Konstitusi Federasi Rusia yang menyatakan Rusia resmi menjadi negara federal yang demokratis dengan bentuk pemerintahan republik serta dipimpin oleh seorang presiden.²² Berikut merupakan poin-poin utama arah kebijakan luar negeri Rusia per periode kepemimpinan pasca runtuhnya Uni Soviet :

4.1.1 Kebijakan Luar Negeri Rusia pada Kepemimpinan Boris Yeltsin (1991-1999)

Sebagai negara federal baru yang terbentuk akibat disintegrasi Uni Soviet, arah kebijakan Rusia saat itu yakni dibawah kepemimpinan Boris Yeltsin menjadi hal penting bagi Rusia sebagai titik balik dalam memulihkan citra Rusia di mata internasional. Sehingga hal tersebut tentu saja mendorong Boris Yeltsin untuk menyusun kebijakan luar negeri Rusia ke arah yang baru dari konsep sebelumnya. Kebijakan luar negeri Rusia pada masa kepemimpinan Boris Yeltsin dapat dikatakan arah kebijakan luar negeri Rusia mulai cenderung pro-Barat.

4.1.2 Kebijakan Luar Negeri Rusia pada Kepemimpinan Vladimir Putin (2000-2008)

Kebijakan luar negeri menjadi alat yang penting bagi Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin pada tahun 2000-2008. Kebijakan luar negeri Rusia diarahkan mampu mencapai beberapa poin utama diantaranya :

1. Gagasan tentang kebangkitan Rusia menjadi “*great power*” kembali
2. Perlawanan Rusia terhadap hegemoni US dan wacana tentang multipolaritas.

²² Data diolah berdasarkan informasi umum dari “*History of Russia*” by ADVANTOUR.

Dalam hal ini, Rusia di bawah kepemimpinan Putin benar-benar memperlihatkan bahwa Rusia merupakan oposisi dari hegemoni US, sehingga *output* dari kebijakan luar negeri Rusia saat kepemimpinan Putin dinilai agak konfrontatif. Rusia sendiri sebenarnya menghendaki tatanan dunia bersifat multipolar.²³ Wacana akan tatanan dunia yang bersifat multipolar dengan Rusia menjadi salah satu kekuatan di dalamnya, bukan merupakan hal baru dalam kepentingan nasional Rusia. Hal ini dianggap penting sehingga kebijakan luar negeri dianggap mampu menjadi cara yang tepat untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, Rusia di bawah kepemimpinan Putin secara jelas menerapkan “*democratic multipolarity*” yang dirasa lebih tepat jika dibandingkan dengan konsep unipolaritas yang diterapkan oleh US.²⁴

Jika prinsip mengenai konsep tatanan dunia saat ini, Rusia bertolak belakang dengan US, maka hal ini tidak berlaku ketika US menyatakan untuk melawan aksi terorisme dengan mempromosikan hal serupa melalui *tagline* “*war on terrorism*” pasca peristiwa 11 September 2001. Vladimir Putin menyatakan untuk turut bergabung dalam upaya tersebut.

3. Rusia sebagai kekuatan regional.
4. Russia sebagai kekuatan dalam aspek energi.

²³ Diambil dari CIDOB International Yearbook, 2010, “*Foreign Policy Of Russia Federation*”, halaman 225.

²⁴ Berdasarkan pidato V. Putin di *Munich Security Conference* pada 2007, Rusia menilai bahwa US mendominasi masyarakat global akan konsep dunia yang unipolar. Sedangkan dalam pandangan yang berbeda Rusia menganggap bahwa ke-unipolaritas-an bukan merupakan suatu hal yang bersifat “*demokrasi*”, sehingga Rusia menyampaikan bahwa konsep multipolaritas sesuai dengan demokrasi yang ada. Maka dari itu, muncul ide tentang konsep “*democratic multipolarity*”.

4.1.3 Kebijakan Luar Negeri Rusia pada Kepemimpinan Dmitry Medvedev (2008-2012)

Kebijakan luar negeri Rusia masa kepemimpinan Dmitry Medvedev memprioritaskan integrasi Rusia dalam komunitas internasional yang setara dengan EU (*European Union*) dan NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) tanpa harus melibatkan aspek politik dan kepentingan nasional Rusia.

Konsep kebijakan luar negeri Rusia pada dasarnya diselaraskan pada kepentingan nasional Rusia itu sendiri. Kepentingan nasional Rusia berjalan sesuai dengan kepentingan banyak negara di dunia yang tentu saja bertumpu pada perubahan global yang signifikan. Ada banyak hal yang menjadi perhatian utama Rusia diantaranya terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang, kejahatan transnasional terorganisir, penyebaran senjata pemusnah massal atau *weapon of mass destruction*(WoMD), konflik regional, masalah-masalah demografi, kemiskinan global, imigran gelap dan perubahan iklim.²⁵

Secara eksplisit, Dmitry Medvedev menyatakan terdapat lima prinsip utama dalam kebijakan luar negeri Rusia di bawah kepemimpinannya saat itu, diantaranya :

1. Rusia mengakui prioritas prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang menentukan hubungan antara rakyat-rakyat beradab.
2. Dunia tetap harus menjadi tatanan yang bersifat multipolar.
3. Rusia tidak ingin melakukan konfrontasi dengan negara mana pun.

Mengenai hal ini, Rusia tidak ingin mengasingkan diri dan

²⁵Diambil dari CIDOB International Yearbook, 2010, "*Foreign Policy Of Russia Federation*", halaman 230.

berkeinginan untuk memajukan berbagai hubungan bersahabat dengan negara-negara di dunia.

4. Pembelaan hidup dan martabat warga negara Rusia dimana pun mereka berada. Di samping itu, Rusia akan melindungi kepentingan kaum usahawan mereka di luar negeri.
5. Rusia, seperti negara-negara dunia lainnya, menentukan kawasan-kawasan yang mana Rusia memiliki kepentingan istimewa, sehingga dirasa dapat menjalin hubungan baik. Hal tersebut merupakan dasar politik luar negeri Rusia itu sendiri.²⁶

4.1.4 Kebijakan Luar Negeri Rusia pada Kepemimpinan Vladimir Putin (2012-saat ini)

Keinginan Rusia untuk terus meningkatkan citra dan *prestige*-nya sejatinya menjadi agenda tersirat dan akan terus disisipkan dalam setiap pengambilan kebijakan luar negeri. Kebijakan-kebijakan tersebut direfleksikan dalam sikap-sikap Rusia di masa kepemimpinan Vladimir Putin untuk yang kedua kalinya.

Dalam *Russian National Security Strategy* tahun 2015, Rusia menyatakan poin-poin utama kebijakan luar negerinya, diantaranya :

1. Pada poin pertama menempatkan ketentuan umum terkait strategi dasar kepentingan nasional dan prioritas strategi nasional, objektivitas, tugas-tugas, ukuran serta lingkup dalam domestik dan kebijakan luar negeri yang

²⁶ Data diambil dari “Hubungan Dunia : Kebijakan Luar Negeri Rusia” dalam website resmi Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia, melalui https://indonesia.mid.ru/web/indonesia_ind/tentang-rusia.

bertujuan dalam pertahanan keamanan nasional Federasi Rusia dalam jangka panjang.

2. Poin kedua membahas posisi Rusia di Dunia Modern saat ini yaitu Rusia akan berupaya untuk memperbaiki dan menjaga hubungan bernegara yang baik. Rusia turut menjaga perdamaian dan kestabilan dunia global. Hal ini berangkat dari banyaknya fenomena konflik internal dan ketidakstabilan yang semakin meluas di berbagai kawasan utama seperti Timur Tengah dan sekitarnya, Afrika, Asia Selatan serta Semenanjung Korea. Rusia menganggap bahwa konflik tersebut dapat melahirkan ancaman terorisme, perselisihan etnis, permusuhan antar agama dan golongan serta menimbulkan manifestasi ekstremisme.²⁷
3. Poin ketiga mencakup jaminan serta hak-hak yang diberikan Pemerintah Rusia kepada warga negara Rusia baik di dalam negeri mau pun yang berada di luar negeri. Di samping itu, Pemerintah Rusia akan terus mengembangkan dan memajukan pertumbuhan perekonomian serta sistem pendidikan, teknologi dan ilmu pengetahuan Rusia.

Pengaruh Rusia untuk terus meningkatkan kembali citranya di mata dunia meliputi aksi langsung terhadap negara-negara di kawasan berkonflik. Timur Tengah menjadi salah satu kawasan penting yang utama dalam mewujudkan kepentingan nasional Rusia khususnya. Kebijakan luar negeri Rusia di Timur Tengah dapat dibagi menjadi dua komponen besar yaitu Iran menjadi salah satu

²⁷Munculnya organisasi teroris yang biasanya menyebut diri sebagai negara Islam . Selengkapnya dapat dilihat di *Russian National Security Strategy*, December 2015 – *Full-text Translation*.

negara yang menjadi tujuan utama bagi persoalan energi dan ekonomi Rusia dengan bekerjasama dengan Pemerintahan Iran. Komponen kedua merupakan bentuk nyata Rusia dalam melakukan hubungan baik dengan negara-negara Timur Tengah demi mendorong *prestigenya* kembali, salah satu negara tersebut ialah Suriah.²⁸

Pada 2015 tepatnya di bawah Pemerintahan Presiden Vladimir Putin, Rusia melakukan intervensi pertamanya di Suriah dengan mengirimkan pasukan udara. Aksi tersebut mendapat ruang khusus bagi Rusia dalam mengintervensi krisis Suriah sehingga pada 30 November 2016 (penandatanganan konsep baru kebijakan luar negeri Rusia), krisis Suriah menjadi salah satu poin penting yang disetujui di dalamnya.

4.2 Sejarah Awal Hubungan Rusia dan Suriah

Hubungan Rusia dan Suriah sebenarnya telah terjalin pada saat Hafiz Assad masih menduduki jabatan sebagai Presiden Suriah. Pada saat itu, Suriah masih memiliki tanggungan utang yang dipinjam dari sejak periode Uni Soviet.²⁹ Di Rusia, Boris Yeltsin mengundurkan diri dari jabatannya pada Desember 1999. Setelah itu, Vladimir Putin secara resmi menjabat sebagai Presiden Rusia setelah pemilihan umum pada Maret 2000. Di Suriah, Hafiz Assad wafat pada Juni 2000

²⁸ Oliver, Olga, Keith Crane, Lowell H., Catherine Yusupov, 2009, "*Russian Foreign Policy (Sources and Implications)*", The RAND Corporation (Project Air Force). Hal. 113

²⁹ Utang yang dimiliki oleh Suriah saat itu sekitar \$12 milyar, sehingga sempat menyebabkan Rusia menunda sementara hubungan kerjasama dengan Suriah. Hal ini dihimpun dengan baik oleh *Izvestia*, salah satu surat kabar harian Rusia (dulunya merupakan surat kabar harian Uni Soviet).

dan Bashar Al-Assad resmi terpilih menjadi Presiden Suriah menggantikan ayahnya beberapa bulan kemudian. Pergantian kekuasaan ini lah yang menyebabkan hubungan Rusia dan Suriah sempat merenggang beberapa saat.

Kerjasama antar dua negara ini mulai terjalin kembali ketika Menteri Luar Negeri Rusia Igor Ivanov mengunjungi Suriah untuk bertemu dengan Presiden Suriah Bashar Al-Assad pada Oktober 2000. Hal serupa dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Suriah Farouk al-Shara yang mengunjungi Moscow pada April 2001.³⁰

Pada Januari 2005, Bashar Al-Assad mengunjungi Rusia dan bertemu Putin untuk pertama kalinya semenjak ia menjabat sebagai Presiden Suriah yang baru. Dalam pertemuan ini, Rusia sepakat untuk menghapuskan sekitar 73% utang Suriah terhadap Rusia. Di samping itu, Rusia dan Suriah sepakat untuk melakukan kerjasama keamanan. Dalam hal ini, Rusia sepakat untuk menjual sistem rudal pertahanan udara Strelts yang terdiri dari *vehicle-mounted short range surface-to-air missiles*. Kerjasama berlanjut ketika Tatneft Rusia menandatangani kesepakatan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan cadangan minyak dan gas baru di Suriah. Menteri Perminyakan Suriah saat itu, Ibrahim Haddad menjelaskan bahwa Tatneft merupakan perusahaan minyak pertama Rusia yang mengikat kontrak untuk mengekstraksi minyak di Suriah. Kesepakatan tersebut memicu perusahaan minyak Rusia lainnya seperti *Stroytransgaz* menandatangani kontrak dengan Suriah untuk membangun pabrik pengolahan gas, pipa minyak, penyulingan minyak serta kompleks petrokimia di Suriah.³¹

³⁰ Katz, Mark N., 2006, "*MERIA: Putin's Foreign Policy Toward Syria*", Middle East Review of International Affairs, Vol.10, No.1, halaman. 54.

³¹*Ibid* hal.56.

Melihat hubungan kedua negara tersebut yang mulanya tercipta melalui aspek ekonomi dan keamanan, maka tidak mengherankan apabila Rusia turut campur tangan ke dalam konflik Suriah pada tahun 2015.

4.3 Konflik Suriah

Konflik Suriah merupakan salah satu konflik yang mendapat banyak perhatian dunia internasional. Konflik ini merupakan konflik berkepanjangan yang hingga saat ini dianggap belum menemukan titik terang. Konflik yang pada awalnya dipicu oleh perseteruan antara Pemerintah Suriah di bawah kepemimpinan Presiden Bashar Al-Assad dan para oposisi anti-pemerintah, pertama kali meletus pada tahun 2011. Konflik yang terjadi di Suriah ini melibatkan banyak aktor sebagai pemain utama dan pembuat kebijakan. Hal tersebut terbukti dengan adanya intervensi negara-negara besar seperti Rusia yang mendukung Pemerintah Bashar Al-Assad dan Amerika Serikat yang cenderung berpihak pada oposisi pemerintah. Di samping hal tersebut, konflik ini telah memakan banyak korban jiwa serta memberikan dampak negatif yang signifikan pada kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Suriah itu sendiri. Kelaparan, kemiskinan, pengungsian menjadi dampak negatif yang nyata akibat konflik berkepanjangan ini.

4.3.1 Latar Belakang Konflik Suriah

Konflik di Suriah berawal dari sebuah protes yang dilakukan oleh sekelompok pelajar di Kota Daraa. Para pelajar melakukan aksi protes terhadap pemerintah dengan menuliskan slogan-slogan yang bertuliskan “Rakyat

menginginkan rezim turun”.³²Aksi protes tersebut mengakibatkan pihak kepolisian yang dipimpin oleh Jenderal Atef Najib yang merupakan sepupu dari Presiden Bashar Al-Assad menangkap dan menahan para pelajar tersebut. Para pelajar tersebut mendapatkan penyiksaan, hal ini diketahui ketika para pelajar tersebut dibebaskan.

Penangkapan serta penyiksaan para pelajar tersebut memicu masyarakat untuk melakukan protes dalam aksi demonstrasi yang digelar di Kota Barat-Daya Daraa. Aksi protes ini mendapat respon yang cukup berlebihan dari aparat keamanan sehingga aparat keamanan melepaskan tembakan ke arah para demonstran.³³

Pada 23 Maret 2011, demonstrasi kembali melanda kota Daraa, kali ini masyarakat yang turun ke jalan lebih banyak dibanding gelombang demonstran sebelumnya. Pasukan keamanan pun kembali melancarkan tembakannya, hingga akhirnya menewaskan 20 orang demonstran saat itu. Menyusul insiden tersebut, Presiden Bashar Al-Assad mengumumkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan sebuah kebijakan diantaranya menerapkan reformasi politik, termasuk di dalamnya ialah menghapus pembatasan partai politik dan menghapus hukum darurat Suriah yang sebelumnya telah diterapkan selama 48 tahun. Namun pengumuman tersebut tidak mendapat sambutan yang baik bahkan terkesan diabaikan oleh pihak oposisi.

³² Demonstrasi ini kemungkinan besar dilatarbelakangi oleh pergolakan yang terjadi di Tunisia dan Mesir. Pergolakan tersebut mengakibatkan penurunan Presiden Tunisia, Zainal Abidin bin Ali pada 14 Januari 2011 serta jatuhnya Presiden Hosni Mubarak dari Mesir pada 1 Februari 2011.

³³ “*Syrian-civil-War*” dalam *www.britannica.com*.

Pada 25 Maret 2011 selepas shalat Jum'at, unjuk rasa kembali terjadi dan pasukan keamanan kembali berupaya membubarkan para demonstran, namun jumlah para demonstran terus bertambah. Aksi unjuk rasa yang dilakukan sejak awal merupakan serangkaian aksi protes yang dilakukan oleh pihak oposisi Pemerintah Suriah. Protes yang dilakukan oleh pihak oposisi mendapat respon balasan dari masyarakat pendukung atau pro-pemerintah. Masyarakat pro-pemerintah kemudian melakukan perlawanan dengan melakukan demonstrasi besar di Kota Damaskus.

Pada 29 Maret 2011, Pemerintah Suriah mengumumkan pengunduran diri dari kabinet. Hal ini merupakan respon terhadap tuntutan pihak oposisi. Esoknya pada 30 Maret 2011, Presiden Bashar Al-Assad untuk pertama kalinya tampil di depan publik pasca berbagai kerusuhan terjadi di Suriah. Ia menyampaikan pidato di hadapan dewan legislatif dengan mengklaim bahwa kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Suriah saat itu merupakan konspirasi yang dilakukan pihak asing. Namun di sisi lain, Ia juga mengakui bahwa tuntutan yang didengungkan oleh para demonstran tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam hal ini, Presiden Assad menolak tuntutan pihak oposisi untuk melakukan percepatan reformasi, pemerintah menyampaikan bahwa reformasi akan dijalankan secara bertahap.³⁴

Pada 8 April 2011, pasukan keamanan Suriah menembak demonstran di beberapa kota di Suriah hingga dinyatakan hampir 200 jiwa tewas. Hal ini yang kemudian menuai kecaman masyarakat internasional terhadap Pemerintah Suriah kala itu. Berbagai kecaman datang dari banyak pemimpin negara serta organisasi

³⁴ Fahham, A. Muchaddam dan A. M. Kartaatmaja, 2014, "*Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya*", *Politica* Vol.5 No.1, hlm. 40-41.

pembela HAM. Pada 19 April 2011, pemerintah secara resmi mencabut undang-undang darurat serta membubarkan Mahkamah Agung Keamanan Negara Suriah, pengadilan yang khusus mengadili pihak-pihak anti-pemerintah. Di samping tu, pemerintah kerap mengambil tindakan untuk mempertahankan kekuasaannya dengan berupaya meredam protes masyarakat. Pemerintah menerapkan aturan yang mengharuskan masyarakat mendapatkan izin bila ingin melakukan aksi protes atau demonstrasi. Oleh karena itu, demonstrasi kemudian dianggap sebagai ancaman nasional.

Kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan tidak berhenti begitu saja, pada 22 April 2011 pasukan keamanan melancarkan tembakan kepada para demonstran yang berkumpul setelah shalat Jumat dilaksanakan. Dalam insiden ini diperkirakan 75 orang tewas. Di tengah kecaman internasional akibat kekerasan yang terjadi, Pemerintah Suriah terus melakukan upaya untuk membungkam dan membubarkan aksi demonstrasi, kali ini tidak hanya dengan senjata api melainkan turut menggunakan tank dan kendaraan lapis baja. Di sisi lain, Pemerintah Suriah memutuskan untuk melakukan pemadaman akses komunikasi, memotong pasokan air dan listrik serta mematikan layanan telepon serta internet di beberapa kota seperti Daraa, Homs dan Baniyas yang dianggap menjadi lokasi pusat anti-pemerintah.³⁵

Pada awal Mei, aksi protes para demonstran telah mencapai Kota Damaskus. Aksi protes ini pun mendapat balasan perlawanan dari pasukan keamanan melalui cara kekerasan. Pasca insiden tersebut, Uni Eropa (UE) memberikan kecaman kepada Pemerintah Suriah berupa pembekuan aset dan

³⁵ *Ibid.* hlm.41

pelanggaran perjalanan kepada sejumlah pejabat tinggi Suriah yang seharusnya bertanggungjawab dalam penanganan demonstrasi.³⁶

4.3.2 Sumber Konflik Suriah

Mengingat konflik yang terjadi di Suriah merupakan konflik berkepanjangan yang berimplikasi pada pelanggaran hak-hak kemanusiaan, maka sumber konflik menjadi hal yang penting untuk di bahas. A. Muchaddam Fahham dan A. M. Kartaatmaja dalam tulisannya menjelaskan bahwa sumber konflik Suriah dibagi menjadi dua diantaranya :

1. Konflik ini dilatarbelakangi oleh masalah yang dihadapi oleh masyarakat Suriah saat sebelum konflik terjadi yakni masalah ekonomi, sosial dan politik.³⁷ Masalah kehidupan berpolitik seperti pembatasan terhadap aktivitas politik dan berpendapat serta sikap aparat keamanan yang cenderung represif. Di sisi lain, masalah ekonomi berfokus pada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingginya jumlah pengangguran serta tingginya inflasi.
2. Konflik tuntutan sebagian penduduk Suriah agar dilakukan reformasi dan penggantian rezim Bashar al-Assad.

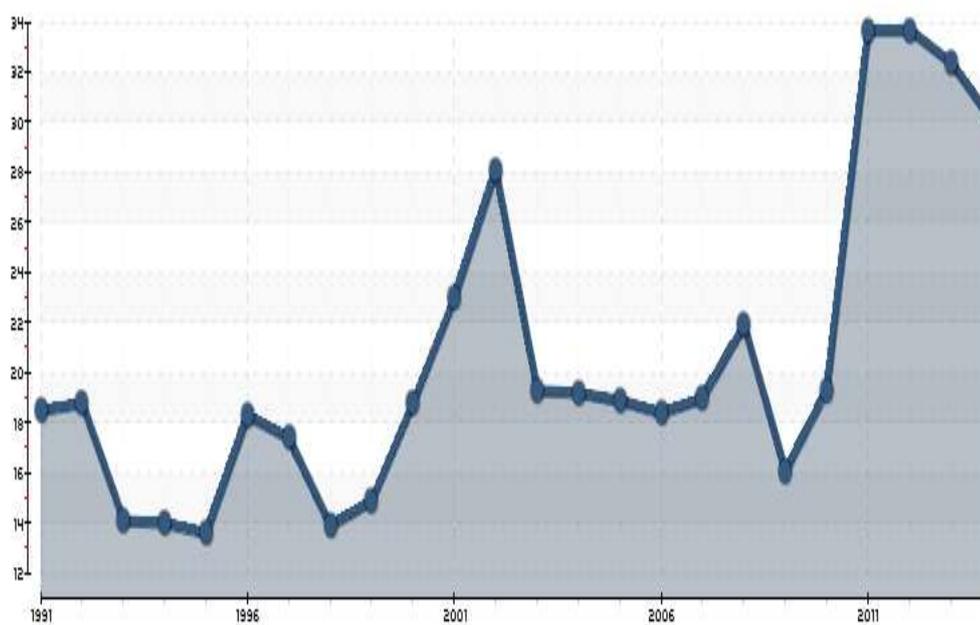
Kedua sumber konflik di atas saling berkaitan satu sama lain. Kemiskinan di Suriah menjadi masalah yang serius dan mengkhawatirkan karena sebagian besar individu Suriah hidup di bawah garis kemiskinan. Laporan penilaian kemiskinan melalui UNDP 2005 (*United Nations Development Programme*)

³⁶*Ibid.* hlm.42.

³⁷*Ibid.* hlm.43.

menyimpulkan bahwa pada tahun 2003 dan 2004, hampir dua juta orang di Suriah (kurang lebih 11,4% dari populasi) merupakan penduduk yang sangat miskin. Jika dilihat melalui *higher expenditure poverty line*, kemiskinan keseluruhan di Suriah diperkirakan hampir 30,1%, angka tersebut mewakili hampir 5,3 juta orang.³⁸

Selain masalah kemiskinan, tingginya angka pengangguran juga menjadi tolak ukur stagnansi bahkan kemunduran aspek ekonomi di Suriah. Data berikut menunjukkan presentase pengangguran di Suriah pra konflik semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sampai kondisi meletusnya perang Suriah untuk pertama kali pada 2011.



Sumber : CIA (creation by : actualitix.com)

Gambar 4.1. Grafik Fluktuasi Presentase Pengangguran di Suriah.

³⁸ Abu-Isma'il, Khalid and Ali Abda-Gadir, "Poverty and Inequality in Syria (1997-2007)", UNDP-Arab Development Challenges Report-Background Paper 2011/15. hlm. 3

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa presentase pengangguran di Suriah sebelum meletusnya konflik pada 2011 bahkan sejak tahun 2007. Sejak tahun 2006 tingkat pengangguran menunjukkan angka sebesar 19% dan mengalami kenaikan menjadi 19,5% di tahun 2007. Peningkatan tersebut memberikan *gap* lebih besar di tahun 2008 menjadi 22%. Penurunan sempat terjadi pada tahun 2009 menjadi sekitar 16%, namun angka tersebut tidak dapat dipertahankan hingga angka pengangguran mengalami peningkatan yang cukup mengkhawatirkan pada tahun 2010, 2011 dengan masing-masing menunjuk pada angka 19%, 34%.

Data di atas menunjukkan bahwa salah satu indikator aspek ekonomi yang menggambarkan ketidakstabilan perekonomian Suriah bahkan sebelum konflik terjadi. Banyaknya masyarakat Suriah yang hidup di bawah garis kemiskinan di tahun 2003 dan 2004. Di samping itu tingginya jumlah pengangguran terutama jika angka tersebut merupakan representasi dari generasi milenial, maka perekonomian Suriah tidak dapat dikatakan sedang baik-baik saja.

Paparan di atas menggambarkan bahwa kondisi Suriah seperti yang telah disebutkan di atas dinilai menjadi sebuah kewajaran untuk menjadi sumber konflik utama mengingat kondisi tersebut terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Bashar Al-Assad yang resmi menjabat sejak tahun 2000 silam.

4.3.3 Aktor-aktor dalam Konflik Suriah

Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik di Suriah dapat disederhanakan menjadi tiga aktor utama, **pertama**, Presiden Bashar Al-Assad dan pendukungnya, **kedua**, oposisi Suriah dan **ketiga**, kelompok Jihadis. Ketiga pihak ini memiliki tujuan dan maksud yang berbeda.

1. Pemerintah Suriah (Presiden Bashar Al-Assad dan Pendukungnya)

Presiden Bashar Al-Assad resmi dilantik untuk menjabat sebagai Presiden Suriah menggantikan ayahnya (Hafiz Al-Assad) pada tahun 2000. Presiden Bashar Al-Assad pada mulanya menyatakan dirinya sebagai seorang reformis. Masyarakat mengharapkan perbaikan serta kemajuan yang signifikan dapat terjadi di Suriah di bawah kepemimpinannya. Namun hal tersebut nyatanya berbanding terbalik dengan tindakan dan berbagai kebijakannya sehingga Suriah mengalami stagnansi bahkan kemunduran dalam banyak aspek kehidupan.

Ketika konflik Suriah meletus pada tahun 2011 silam, Presiden Bashar Al-Assad bermaksud mempertahankan negara dan pemerintahannya. Ia mendapat dukungan dari minoritas Alawi, Ismaili, Druze dan Kaum Kristen karena kebijakan sekulernya. Di samping itu, hal terpenting ialah Presiden Bashar Al-Assad mendapatkan dukungan penuh dari Rusia, Iran dan China serta Kelompok Hizbullah Lebanon.³⁹

³⁹Fahham, A. Muchaddam dan A. M. Kartaatmaja, 2014, "*Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya*", *Politica* Vol.5 No.1, hlm. 45-46.

2. Kelompok Oposisi Suriah

Kelompok oposisi di Suriah terbagi menjadi dua kelompok oposisi besar yaitu kelompok pemberontak Suriah dan kelompok oposisi anti-kekerasan, anti-intervensi asing dan antisektrarianisme. Pada dasarnya tujuan dari kelompok oposisi Suriah ini ialah ingin merebut kekuasaan dari Bashar Al-Assad.

- a. **Kelompok Pemberontak Suriah** terbagi menjadi tiga kelompok besar yaitu *Free Syrian Army (FSA)*, *Syrian National Council (SNC)* serta *Syrian National Council for Opposition and Revolutionary Forces (SNCORF)*. Koalisi SNCORF dibentuk atas inisiatif Amerika Serikat di Doha, Qatar. Koalisi ini terdiri dari 60 anggota yang berasal dari perwakilan masing-masing kota-kota besar di Suriah, pemberontak Suriah yang berdomisili di luar negeri serta 20 mantan anggota SNC. *Syrian National Council for Opposition and Revolutionary Forces (SNCORF)* diyakini sebagai wakil masyarakat Suriah oleh beberapa negara.⁴⁰
- b. **Kelompok oposisi anti-kekerasan, anti-intervensi asing dan antisektrarianisme** yang merupakan koalisi bernama *National Coordination Body for Democratic Change*.

⁴⁰ *Ibid.*

3. Kelompok Jihadis

Kelompok ini berafiliasi dengan Al-Qaeda yang terdiri dari Jabha al-Nusra, Ahrar al-Sham kataeb, Liwa' al-Tauhid, Ahrar Souria, Halab al-Shahba, al-Harakah al-Fajr al-Islamiah, Dar al-Ummah, Liwa Jaish Muhammad, Liwa' al-Nasr, Liwa' Dar al-Islam dan lain-lain.

Pada awalnya kelompok ini diyakini membantu kelompok oposisi dalam tujuannya merebut kekuasaan Suriah dari Pemerintah Suriah hingga pada akhirnya kelompok Jihadis memiliki agenda dan kepentingan tersendiri yaitu keinginan merebut kekuasaan dan negara Suriah sebagai upaya membentuk dan mendeklarasikan negara Suriah berideologi Khilafah yakni *Islamic State of Iraq and Syria/Sham* atau ISIS.⁴¹

Pada tahun 2012, kelompok Jihad Jabha al-Nusra dinyatakan sebagai kelompok teroris oleh Amerika Serikat, hal ini karena kelompok Jihadis tersebut menyatakan bertanggungjawab dalam sejumlah aksi bom bunuh diri yang ditargetkan terhadap pemerintah Suriah selama konflik terjadi. Pada Februari 2014, al-Qaeda pun resmi memutuskan hubungannya dengan ISIS.⁴²

⁴² *Ibid.*

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Kebijakan luar negeri Rusia terhadap konflik Suriah pada periode tahun 2015 sampai dengan 2018 mengalami perubahan dalam tiga bentuk.

Berdasarkan pemaparan data serta pembahasan yang telah disajikan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan luar negeri Rusia terhadap konflik Suriah pada 2015 sampai dengan 2018 mengalami perubahan dalam fase pertama yaitu perubahan penyesuaian atau *adjustment changes*, fase kedua yaitu perubahan pada program atau *program changes* dan yang terakhir fase ketiga yaitu perubahan dalam orientasi internasional atau *internasional orientation*.

Ketiga fase perubahan tersebut dapat terjadi karena terdapat agen-agen pemegang kendali dibaliknya. Nyatanya perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh agen-agen yang bersifat internal dan eksternal Rusia. *Leader driven* atau pengaruh pemimpin dalam hal ini adalah Presiden Rusia, Vladimir Putin memegang kontrol dan kendali penuh atas setiap poses pengambilan kebijakan luar negeri terhadap konflik Suriah tersebut. Kepemimpinan Putin menerapkan garis koordinasi dari atas ke bawah yang langsung menjadikan Putin

sebagai pemimpin yang memutuskan segala hal dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Putin masih bersifat hirarkis.

External shocks menjadi faktor eksternal juga menjadi agen paling dominan yang membuat Rusia mampu mengubah kebijakan luar negerinya. Hal ini dikarenakan fenomena internasional yang terjadi di dalam konflik Suriah berdampak langsung bagi setiap pihak secara fluktuatif termasuk pihak rezim Bashar Al Assad yang didukung oleh Rusia.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditelaah dipaparkan, saran yang dapat diberikan oleh peneliti yakni :

1. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Suriah yang tengah melakukan perundingan perdamaian maka diharapkan agar lebih efisien dan memegang teguh hasil dan perjanjian yang telah ditetapkan bersama.
2. Bagi aktor-aktor pengambil kebijakana luar negeri Rusia diharapkan untuk ikut memegang andil dan kendali dalam setiap perumusan kebijakan luar negerinya bukan hanya tunduk pada kekuasaan pemimpin, karena setiap aspek lembaga sejatinya memiliki lingkung, pemahaman serta pengetahuan yang lebih dominan dalam kebijakan yang akan diambilnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Heywood, Andrew (2011). *Global Politics*. Palgrave Macmillan.
- Jackson, Robert & Sorensen, Georg (1999). *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Media.
- Lo, Baba, 2003, “*Vladimir Putin and The Evolution of Russian Foreign Policy*”, Berlin, The Royal Institute of International Affairs-Blackwell Publishing.
- Mas’oed, Mochtar (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta. LP3ES.
- Merriam, B. Sharan. (2009). *Qualitative Research, A Guide To Design and Implementation*.
- Morgenthau, Hans J (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. The University of Chicago. New York
- Neumann, W. Lawrence (2011). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th Edition)*. Pearson.
- Oliver, Olga, Keith Crane, Lowell H., Catherine Yusupov, 2009, “*Russian Foreign Policy (Sources and Implications)*”, The RAND Corporation (Project Air Force).
- Slyvan, Lu, 2015, “*Vladimir Putin: Russian Leader*”, North Mankato, Abdo Publishing, ABDO.
- Talukdar, Dr. Indrani and Dr. Omair Anas, 2018, “*The Astana Process and The Future of Peaceful Settlement of The Syrian Crisis: A Status Note*”, New Delhi, Indian Council of World Affairs.
- The Military Balance (2017). *Military Balance: Chapter Five, Russia and Eurasia*. Routledge-Taylor and Francis Group.
- Yin, Robert, K (2009). *Case Study Research: Design and Methods (Fourth Edition)*. London. Sage Publication.

JURNAL DAN LAPORAN:

- Abu-Ismaïl, Khalid and Ali Abda-Gadir, “*Poverty and Inequality in Syria (1997-2007)*”, UNDP-Arab Development Challenges Report-Background Paper 2011/15.
- Angela, Stent (2016), *Putin’s Power Play in Syria*, New York, Foreign Affairs ; New York Vol. 95, page. 3.
- CIDOB International Yearbook, 2010, “*Foreign Policy Of Russia Federation*”.
- Fahham, A. Muchaddam dan A. M. Kartaatmaja, 2014, “*Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya*”, *Politica* Vol.5 No.1
- Katz, Mark N (2006), *Putin’s Foreign Policy Toward Syria*, Middle East Review of International Affairs, Vol.10, page 53.
- Leonard, Mark (2015), *Russia’s Great Game in Syria*, New Statesman.
- Novrizon, Romi (2012), *Kebijakan Rusia mendukung Rezim Bashar Al-Assad dalam Konflik Suriah Tahun 2011-2012*.
- Politburo 2.0: *Renovation instead of dismantling*. 2017, MINCHENKO CONSULTING.
- Russian National Security Strategy, Full-text Translation (UNCLASSIFIED), December 2015*.

LAMAN INTERNET :

- “Tentang Rusia” dalam Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia, melalui https://indonesia.mid.ru/web/indonesia_ind/tentang-rusia.
- Walt, Stephen M, 2018, “*I Knew The Cold War, This is No Cold War*”, Foreign Policy. Diakses melalui <https://foreignpolicy.com/2018/03/12/i-knew-the-cold-war-this-is-no-cold-war/>
- Pearson, Alexander, 2017, “*Syria Conflict: What do The US, Russia, Turkey and Iran Want?*”, The SAFIA Blog (Student Association for International Affairs).
- “*History of Russia*” by ADVANTOUR.
- “Hubungan Dunia : Kebijakan Luar Negeri Rusia” dalam website resmi Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia, melalui https://indonesia.mid.ru/web/indonesia_ind/tentang-rusia.

“*Syrian-civil-War*” dalam www.britannica.com.

DW News, “*Death Toll in Syria Tops 55.000 in 2015*” , diakses di <https://www.dw.com/en/death-toll-in-syria-tops-55000-in-2015/a-18953548>.

“*Syrian Network for Human Rights*”. <http://sn4hr.org/blog/2017/03/18/35726/>.
Diakses pada 05/05/19.

Syria Conflict: What do the US-Russia-Turkey and Iran Want? Diakses melalui <https://www.dw.com/en/syria-conflict-what-do-the-us-russia-turkey-and-iran-want/a-41211604>.

Konsep Baru Kebijakan Luar Negeri Rusia diakses melalui [http://parstoday.com/id/radio/world-i30820-konsep-baru-kebijakan-luar-negeri-rusia-\(bagian-i\)](http://parstoday.com/id/radio/world-i30820-konsep-baru-kebijakan-luar-negeri-rusia-(bagian-i))

“*Frustrasi dan minim dukungan, Rusia mungkin akan segera keluar dari Suriah*” yang diakses pada laman <https://www.kiblat.net/2017/03/22/frustrasi-dan-minim-dukungan-rusia-mungkin-segera-keluar-dari-suriah/>, diakses pada Januari 2018 pkl.08.09 WIB.

https://id.rbth.com/politics/2015/12/11/lima-hal-kunci-dalam-kebijakan-luar-negeri-rusia-di-2015_549567

<https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-putin-assad/russias-putin-hosts-assad-in-fresh-drive-for-syria-peace-deal-idUSKBN1DL0D5>

http://parstoday.com/id/news/middle_east-i54842-dubes-suriah-untuk-pbb-barat-tidak-ingin-perang-berakhir

<https://www.foreignaffairs.com/articles/syria/2017-12-13/putins-plan-syria>